



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK

KAB. KUTAI KARTANEGARA



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Awang. Sabran Bc.Hk No.63 Telp.(0541) 661518, Fax.(0541) 662602
TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : SK-25/BKBP/SET-II/800/02/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026. Dengan susunan Personil Tim seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah :

1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Menyiapkan dan merumuskan program renja;
3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Renstra;
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
5. Membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Melaporkan hasil penyusunan Renstra kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 24 Februari 2021

Kepala Badan,



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : SK-25/BKBP/SET-II/800/02/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Badan	Pengarah	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3	Kasub.Bag. Penyusunan Program	Ketua	
4	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
5	Kabid. Ket. Ekososbud	Anggota	
6	Kabid. Idiologi dan Wasbang	Anggota	
7	Kabid. Politik Dalam Negeri	Anggota	
8	Kasub.Bid. Ket. Ekonomi	Anggota	
9	Kasub.Bid. Ket. Sosbud	Anggota	
10	Kasub.Bid. Idiologi dan Kewaspadaan	Anggota	
11	Kasub.Bid. Pembauran	Anggota	
12	Kasub.Bid. Fasilitas Parpol	Anggota	
13	Kasub.Bid. Fasilitas Ormas	Anggota	
14	Darmadian Nur	Anggota	
15	Mugni	Anggota	
16	Zaini Ma'ruf	Anggota	
17	Juminah.HR	Anggota	
18	Yeni	Anggota	
19	Agustin Hesti Sutarni	Anggota	

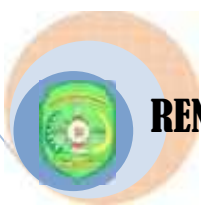
Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 24 Februari 2021

Kepala Badan,


RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat kanunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, maka Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyusun Rencana Strategis yang merupakan acuan penentuan program pada tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini secara garis besarnya mengupas Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Didalam Renstra ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik menyesuaikan dengan perkembangan saat ini hingga ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai unsur pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai implementasi dari RPJMD 2021 - 2026. Serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

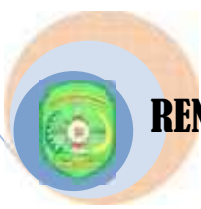
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk menjadi arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai unsur pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, September 2021

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,



RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra Kemendagri	44
3.4 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII PENUTUP	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai unsur pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang berfungsi sebagai wujud koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik antar perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dengan pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh terhadap realisasi pencapaian target dan sasaran yang terdapat pada Renstra yang terdahulu, dimana terdapat beberapa realisasi yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, baik dari internal maupun eksternal, sehingga dilakukan proses terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional,

RPJMD merupakan suatu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih terarah sesuai dengan dinamika perubahan yang ada saat ini, tentunya hal ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya. Hal ini memiliki keterkaitan dengan RPJMD yaitu terkait hal meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani, kemudian juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional dan provinsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat serta peningkatan kualitas demokrasi di daerah.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

Badan Kesbangpol berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021 telah memberikan hasil dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi sebagai tugas kedepan.

Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup tinggi, tata ruang dan degradasi lingkungan, infrastruktur dan energi serta masalah pendidikan dan kesehatan, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan akses dalam penciptaan iklim yang kondusif.

Sebagai langkah tidak lanjut hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Renstra yang ada sampai tahun berjalan serta mengikuti proses RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026, kemudian terdapat perubahan terhadap sasaran yang akan dicapai beserta indikator oleh Badan Kesbangpol agar bisa menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, terutama perubahan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran daerah.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum mencakup :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
18. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas, fungsi dan mencapai sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam konstitusi menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, ke dalam arah kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 - 2026;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja dan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD, mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, mencakup :
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.

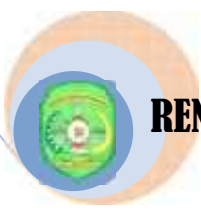
Bab IV Tujuan dan Sasaran, mencakup : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab VIII Penutup.



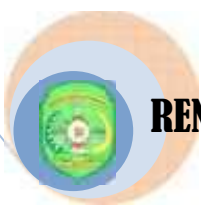
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan unsur penting dalam perencanaan layanan perangkat daerah untuk memahami kondisi riil paling mutakhir dari organisasi yang akan menyusun rencana strategis sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual, khususnya menyangkut sumber daya internal organisasi dan kinerja layanan yang telah dicapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana pada Renstra sebelumnya masih mengacu pada Perda Nomor 10 tahun 2011. Serta seharusnya Badan Kesbangpol menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 melaksanakan unsur pemerintahan umum yang langsung berada di bawah pemerintah pusat, namun sampai saat ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang urusan pemerintahan umum belum terbit, sehingga masih tetap menjalankan tugas dan fungsi yang telah ada. Kemudian dalam peraturan terbaru ini pula Badan Kesbangpol telah mengalami perubahan nomenklatur dari



Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun tidak merubah susunan organisasi yang ada. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

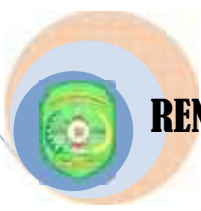
Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;



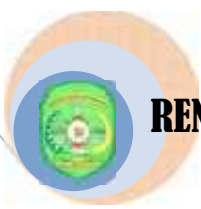
RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan; dan
 - 2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.

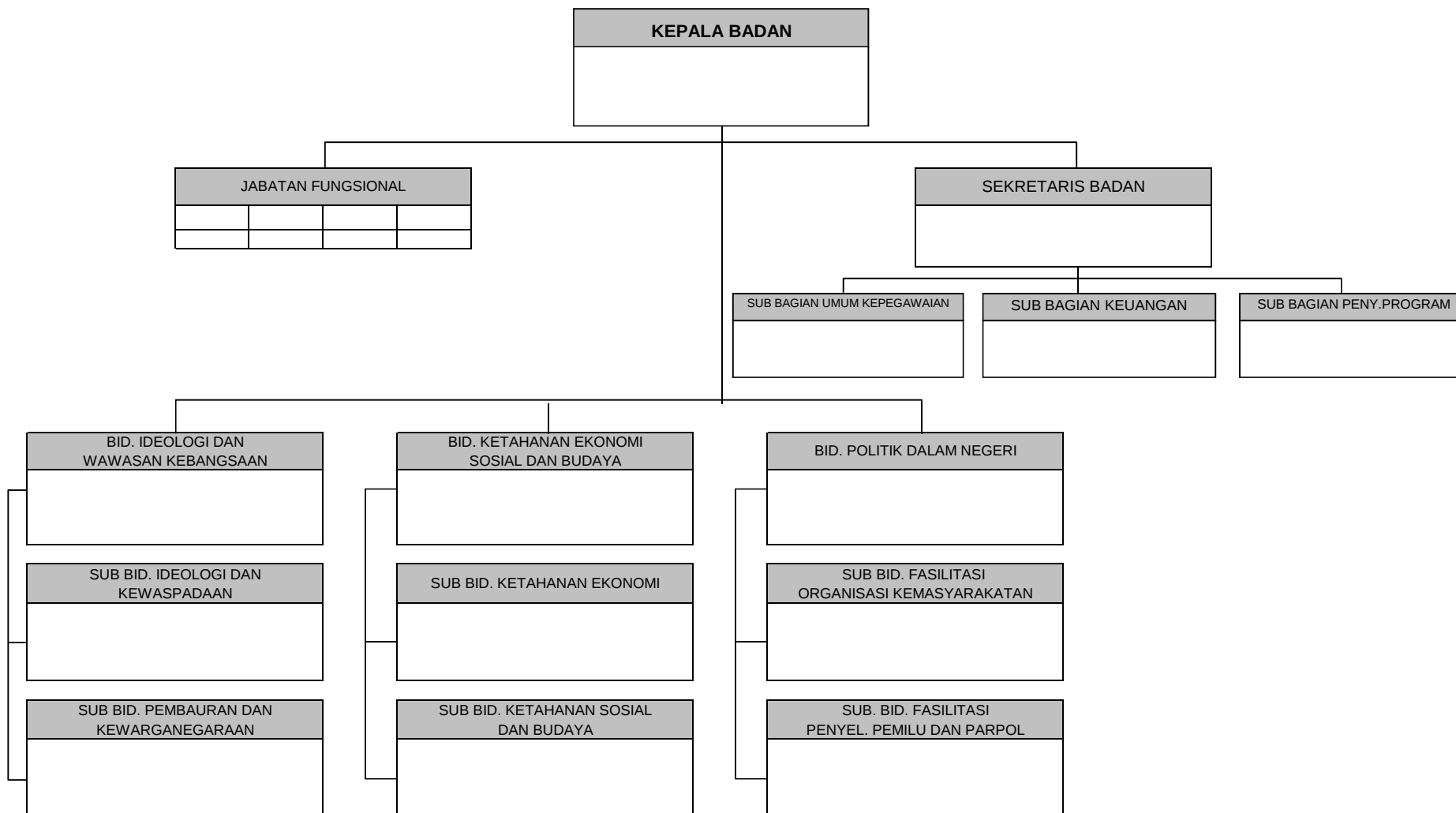


RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Secara rinci bagan struktur susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**





RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

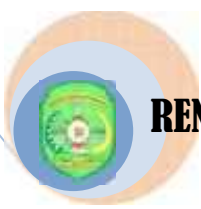
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara per 1 Januari 2020 berjumlah 75 orang ASN yang terdiri dari 13 Pejabat Struktural (1 pejabat telah pensiun dan belum ada pengganti) dan 65 Non Struktural. Sedangkan tenaga kontrak harian lepas berjumlah 20 orang. Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Jabatan Fungsional. Data pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan Pangkat/Golongan dapat disampaikan sebagai berikut :

DATA PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	S2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	S1	1	1	-	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	20
3.	Diploma III	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	SLTA	-	-	-	4	1	1	-	5	-	22	16	-	-	-	-	49
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	2	-	8	4	7	6	5	-	22	16	-	-	-	-	75

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Data	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D	
1.	PNS	5	2	-	8	4	7	6	5	-	22	16	-	-	-	-	75
Jumlah		5	2	-	8	4	7	6	5	-	22	16	-	-	-	-	75

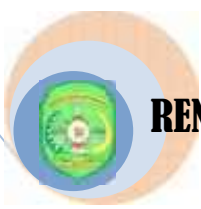


DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN STRUKTURAL				
		ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	S2	1	1	2	2	6
2.	S1	-	-	1	6	7
3.	Diploma III	-	-	-	-	0
4.	SLTA	-	-	-	-	0
5.	SLTP	-	-	-	-	0
6.	SD	-	-	-	-	0
Jumlah		1	1	3	8	13

Secara umum dalam menjalankan tugas pokok perlu didukung dengan sarana dan prasana, Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

3. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol dan Mas sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	8	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Besi	22	2016	Baik
6	Penghancur Kertas	2	2015	Baik
7	CCTV	4	2013	Baik
8	PC	31	2015	Baik
9	Printer	34	2015	Baik
10	UPS	20	2015	Baik

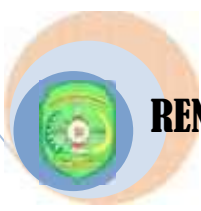
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

a. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, fasilitasi organisasi politik, organisasi masyarakat dan kelembagaan partai politik serta pemilihan umum.

Bidang ini melayani surat rekomendasi pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Keterangan Lapor (SKL) bagi organisasi kemasyarakatan kepada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, baik melalui manual maupun sistem online. Dan Rekomendasi pemberian hibah dan bansos kepada masyarakat yang sesuai dengan tupoksi,



serta membantu fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Bidang ini membina forum-forum bentukan pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komuniti Intelijen Daerah (KOMINDA) selain itu juga melayani pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian dan Surat Keterangan Tidak Terlibat Dalam Kegiatan dan Organisasi Yang Mengkhianati NKRI (sebagai persyaratan bagi calon aparat desa)

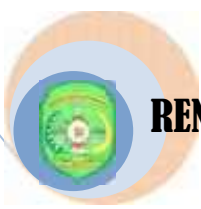
c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Bidang ini memfasilitasi dalam peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan yang paling utama adalah permasalahan Narkoba.

A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Periode pembangunan tahun 2013 s/d 2017, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data LPPD Kutai Kartanegara 2013 – 2017. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

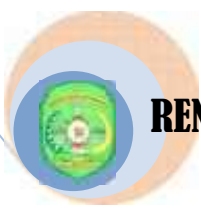
pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan terbanyak dilakukan adalah pada tahun 2015 dan 2017, pembinaan politik di daerah paling besar pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 58 kegiatan dan 70 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dan Menjelang Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2018, kegiatan ini telah membawa hasil yakni penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai serta legitimate. Kemudian faktor lain yang membuat adanya kesenjangan kegiatan adalah perubahan format pelaporan kegiatan yang lebih dirinci pada setiap lokasi dan pelayanan yang diberikan. Secara implisit dapat terlihat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, namun secara anggaran terdapat penurunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	-	-	-	63,83	71	75	81	85	63,83	63,83	74,88	77,83	0	100	89,90	99,84	96,09	0
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100	100	100	100	100	99,32	98,37	97,39	97,77	8,29	99,32	98,37	97,39	97,77	8,29
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	-	-	-	83	80	83	85	88	83	80	83	85	0	100	100,00	100	100	0
3	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	-	7	5	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	-	-	-	86,89	87,14	87,14	87,39	87,39	86,89	87,14	87,14	87,39	0	100	100,00	100	100	0
5	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100,00	100	100	0
6	Persentase Konsistensi Renstra dan Renja	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100,00	100	100	0
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	-	-	-	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
II	Jumlah konflik dan gejala	-	-	-	47	40	35	33	30	39	44	38	28	1	82,98	110,00	108,57	84,85	3,33
1	Cakupan penanganan konflik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100,00	100	100	0
2	Cakupan penanganan gejala masyarakat	-	-	-	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	0	100,00	100	100	0
III	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	-	-	-	58,93	60,44	70	71	72	58,93	60,44	81,24	57,00	0	100	100,00	116,06	80,28	0
1	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	-	-	-	20	40	60	80	100	20	40	59,23	79,18	0	100	100,00	98,7167	98,975	0
2	Persentase parpol yang tertib administrasi	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100,00	100	100	0
3	Persentase ormas yang tertib administrasi	-	-	-	70	75	80	90	100	45	53,33	40	80	20	64,29	71,11	50	88,89	20
IV	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	-	-	-	20	40	60	80	100	20	40	58,32	70,73	0	100	100,00	97,2	88,41	0
1	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wasbang	-	-	-	20	40	60	80	100	20	40	58,32	70,73	0	100	100,00	97,20	88,41	0
2	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	-	-	-	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya penyakit masyarakat	-	-	-	20	40	60	80	100	20	40	60	80	0	100	100,00	100	100	0
V	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	-	-	-	3	3	2	2	4	3	13	6	8	0	100	433,33	300	400	0
VI	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	1	1	1	2	2	1	8	3	5	0	100	800,00	300	250	0

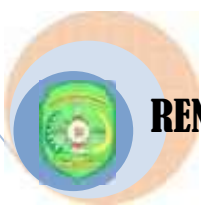
PEMERINTAH KABUPATEN KARTANEGARA
 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RINDA DESANTIS.Sos., M.Si
 NIP. 19591226 200112 2 002



B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggaran pendanaan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga berdampak kepada pencapaian realisasi yang dapat dikategorikan “baik” Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesbangpol sebagai berikut : Tahun 2017 sebesar 90,98 persen, tahun 2018 sebesar 91,17 persen, tahun 2019 sebesar 91,14 persen, dan tahun 2020 sebesar 89,26 persen. Dilihat dari data tersebut capaian terendah terdapat pada tahun 2020 dan yang tertinggi pada tahun 2018, hal realisasi ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap progres target pencapaian program, karena kegiatan penunjang pencapaian target program hanya bisa dilaksanakan dengan pola minimal, tentunya ini dipengaruhi beberapa faktor yang dimulai anggaran pendanaan yang semakin tahun semakin menurun, realisasi anggaran dan progres pencapaian target program, sebagai berikut :

1. Pengaruh keadaan ekonomi secara global yang cenderung menurun, sehingga berpengaruh pada pendapatan dan bagi hasil untuk Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru dan yang berubah, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian program
3. Proses/mekanisme penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami gangguan baik secara sistem maupun



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

operasional, sehingga berpengaruh terhadap proses pengajuan dan realisasi anggaran perangkat daerah

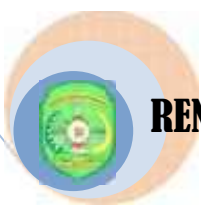
4. Adanya faktor eksternal dari pihak instansi vertikal yang menjalankan operasi secara masif khususnya pada kasus penyakit masyarakat
5. Masih belum sinkronnya penjadwalan pelaksanaan kegiatan
6. Adanya tahapan waktu kegiatan yang harus ditepati, sehingga terdapat kegiatan yang terlewat untuk dilaksanakan mengingat tahapan tersebut sudah melangkah pada tahapan berikutnya, hal ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak.
7. Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan ditunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan perangkat daerah pada level program, selanjutnya kinerja Badan Kesbangpol akan dianalisis melalui pendanaan pelayanan perangkat daerah melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Belanja Tidak Langsung	8.226.657.668,45	7.784.243.727,82	7.549.239.783,52	8.344.850.751,10	8.309.711.321,00	7.468.719.141,00	6.930.848.236,00	6.708.128.000,00	7.067.276.672,00	1.632.720.351,00	90,79	89,04	88,86	84,69	19,65
Belanja Pegawai	8.226.657.668,45	7.784.243.727,82	7.549.239.783,52	8.344.850.751,10	8.309.711.321,00	7.468.719.141,00	6.930.848.236,00	6.708.128.000,00	7.067.276.672,00	1.632.720.351,00	90,79	89,04	88,86	84,69	19,65
Belanja Langsung	1.975.556.178,60	3.386.959.691,00	4.961.514.291,00	7.264.723.943,40	6.174.300.384,00	1.813.762.759,00	3.254.269.074,00	4.694.589.568,00	6.865.374.494,00	124.881.819,00	91,81	96,08	94,62	94,50	2,02
Belanja Pegawai	233.545.656,00	436.826.600,00	651.611.400,00	842.864.000,00	219.580.000,00	147.095.656,00	405.637.700,00	610.204.900,00	823.554.600,00	-	62,98	92,86	93,65	97,71	-
Belanja Barang Jasa	1.697.972.722,60	2.950.133.091,00	4.276.234.891,00	6.191.324.543,40	5.920.478.384,00	1.625.790.103,00	2.848.631.374,00	4.053.559.668,00	5.813.807.894,00	124.881.819,00	95,75	96,56	94,79	93,90	2,11
Belanja Modal	44.037.800,00	-	33.668.000,00	230.535.400,00	34.242.000,00	40.877.000,00	-	30.825.000,00	228.012.000,00	-	-	-	91,56	98,91	-
JUMLAH BL + BTL	10.202.213.847,05	11.171.203.418,82	12.510.754.074,52	15.609.574.694,50	14.484.011.705,00	9.282.481.900,00	10.185.117.310,00	11.402.717.568,00	13.932.651.166,00	1.757.602.170,00	90,84	91,17	91,14	89,26	12,13

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RINDA DESANTIS S.Sos., M.Si
NIP. 19650212200112 2 002



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

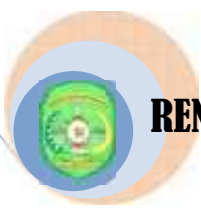
Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

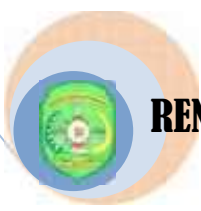
Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun



terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralism lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, Kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat



menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai “penengah” yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga Negara (*citizen*) bukan sebagai pelanggan (*customer*). Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”.



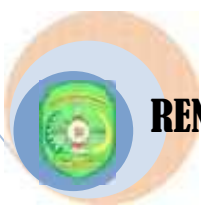
Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

7) Program Pro-Masyarakat

Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

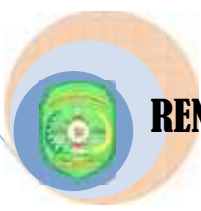


B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak kewajiban masyarakat sebagai warga Negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.

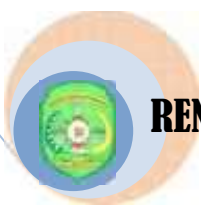


2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan



Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :

a. Partai Politik

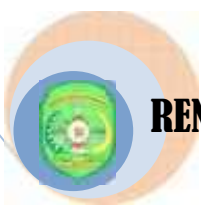
Partai Politik berperan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;

b. Tokoh politik dan tokoh masyarakat

Para tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik, santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.



6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

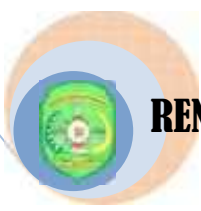
Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

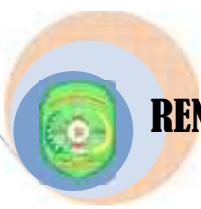
Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada Bab II, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

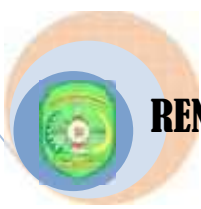
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum belum memadai 2. Masih lemahnya pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD 3. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 4. Masih lemahnya pengelolaan dan penataan kearsipan



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

			5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja
2	Situasi kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
		Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

			8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Masih terdapat parpol dan organisasi yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol
 - a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 88 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

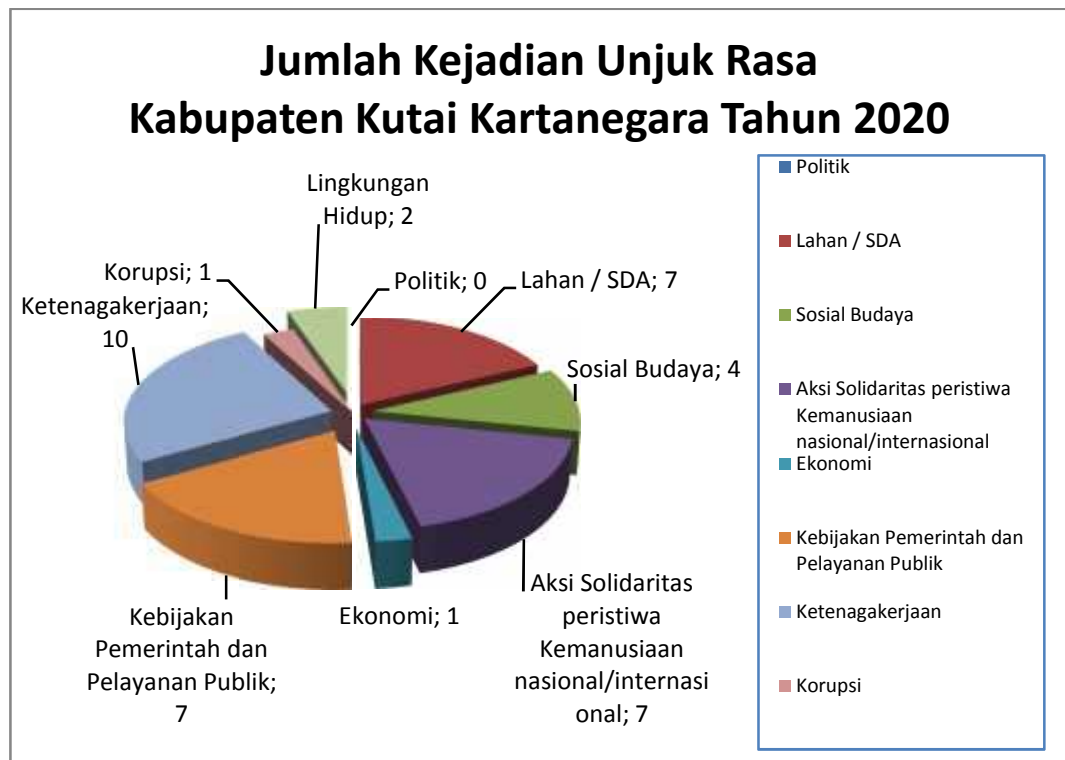


RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

- c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol
- d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2016	2017	2018	2019	2020
B	B	B	BB	BB

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat





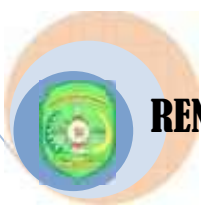
RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

3. Data sebaran tenaga kerja asing

**Data Sebaran Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA)
di Kab. Kutai Kartanegara tahun 2018 – 2020**

No.	Kecamatan	2018	2019	2020
1.	Samboja	9 Orang	6 Orang	5 Orang
2.	Muara jawa	7 Orang	87 Orang	79 Orang
3	Sanga-sanga	1 Orang	-	-
4	Marang kayu	3 Orang	-	-
5	Muara badak	1 Orang	-	-
6	Anggana	20 Orang	-	1 Orang
7	Loa Janan	-	7 Orang	-
8	Loa Kulu	16 Orang	30 Orang	5 Orang
9	Tenggarong	-	1 Orang	-
10	Sebulu	4 Orang	5 Orang	1 Orang
11	Muara Kaman	13 Orang	30 Orang	7 Orang
12	Tenggarong Seberang	1 Orang	8 Orang	3 Orang
13	Kota Bangun	1 Orang	2 Orang	-
14	Muara Wis	-	-	-
15	Muara Muntai	-	-	-
16	Kenohan	-	5 Orang	-
17	Kb. Janggut	1 Orang	13 Orang	15 Orang
18	Tabang	9 Orang	8 Orang	13 Orang
	Jumlah	85 Orang	202 Orang	129 Orang

Dari data tabel diatas dapat dilihat sebaran tenaga asing pada tiap-tiap perusahaan di kecamatan sudah terpantau dengan lengkap dengan data masing-masing dan pada tahun 2019 – 2020, sehingga akan menjadi kewaspadaan bagi aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelengkapan administrasinya.



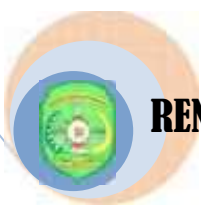
RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

4. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2018 – 2020

No.	Jenis Kriminal	2018	2019	2020
1	Narkoba	235	219	28
2	Pembunuhan	1	3	3
3	Kejahatan Seksual	29	24	12
4	Penganiayaan	31	13	8
5	Pencurian	34	33	41
6	Eksplorasi Anak Bawah Umur	29	22	15
7	Premanisme	-	4	8
	JUMLAH	359	318	115

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 359 kasus, telah terjadi penurunan pada tahun 2019 sebanyak 41 kasus menjadi 318 kasus dan pada tahun 2020 menurun lagi sebanyak 203 kasus menjadi 115 kasus, namun hal tersebut masih jauh dari yang menjadi target Badan Kesbangpol, dengan kegagalan pencapaian indikator ini akan menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

5. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2015 – 2020

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	ORMAS	4	-	2	3	4	12
2.	OKP	5	3	-	-	-	-
3.	LSM	2	-	2	-	2	-
4.	PAGUYUBAN	1	3	-	2	3	-
5.	AGAMA	-	1	-	-	1	2
6.	PROFESI	7	10	3	2	-	-
7.	LEMBAGA ADAT	5	2	2	1	-	-
8.	YAYASAN	-	-	-	-	2	2
	JUMLAH	24	19	9	8	12	16

Berdasarkan tabel diatas, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 90% dengan realisasi 80% sehingga capaian 88,89%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya, ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

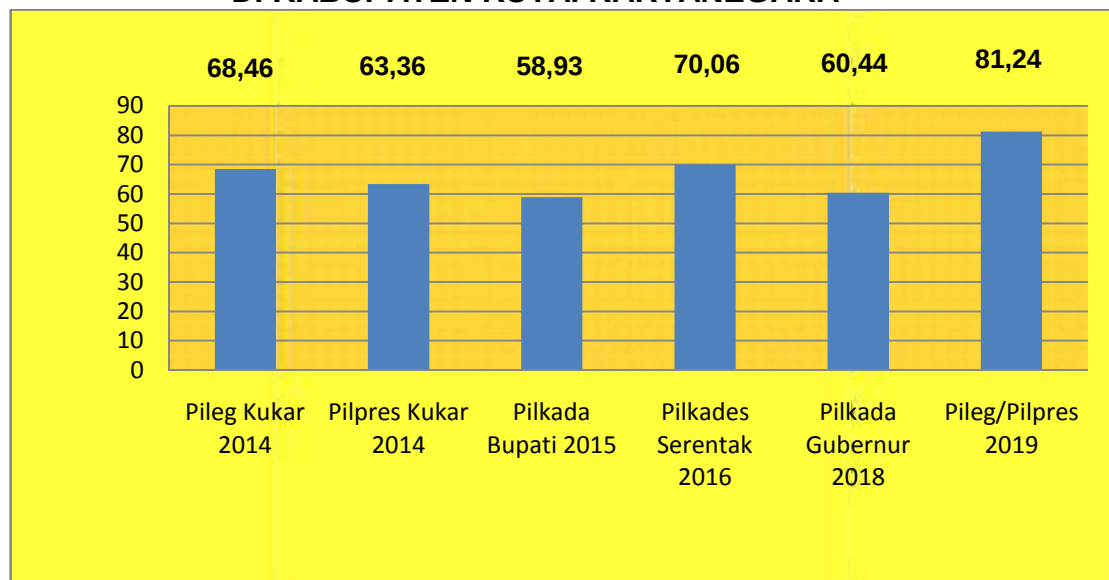
b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada

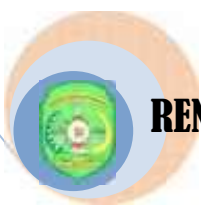
c. Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpr e 81,24	Pilbup 57,00

GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2015 – 2020 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2019 sebesar 81,24 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang



tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

(disusun berdasarkan kinerja layanan 5 thn terakhir/lalu pada Tabel T-C.23)

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1 pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum belum memadai
		2 Masih lemahnya pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD
		3 Kurangnya kompetensi SDM Aparatur
		4 Masih lemahnya pengelolaan dan penataan kearsipan
		5 Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset
		6 Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja
Situasi kondusifitas daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1 Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat
		2 Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
		3 Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	1 Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi
		2 Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat

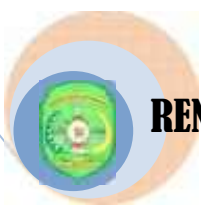
PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
		3 Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
		4 Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan
		5 Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat
		6 Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
		7 Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
		8 Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
	Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam bidang politik
		2 Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi
		3 Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

NIP. 19691226 200112 2 002



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

A. Visi

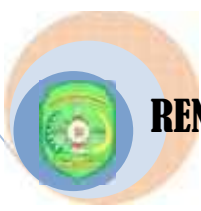
Adapun Visi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendukung pelaksanaan misi ke 1 yaitu **“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.”** Sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel sebagai berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

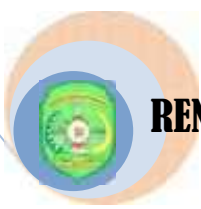
Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum belum memadai 2. Masih lemahnya pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD 3. Masih lemahnya pengelolaan dan penataan	1. Terlaksananya seluruh pelayanan penunjang administrasi umum 2. Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada dan pelaporan BMD yang akurat 3. Terbentuknya Tim



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

			kearsipan 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja	Bekias OPD sebagai langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi 4. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang memadai 5. Penerapan SPIP di Badan Kesbangpol 6. Melaksanakan Perubahan Renstra sebagai langkah awal konsistensi perencanaan
		Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah	1. Penguatan terhadap FKDM 2. Peningkatan koordinasi antar instansi vertikal di daerah 3. Pemantauan deteksi dini di daerah rawan konflik 4. Pengawasan terhadap TKA asing
		Kurangnya pemahaman aparatur dan	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan	1. Penyuluhan terhadap masyarakat masih terus berjalan



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

		masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah	walaupun dengan pola minimal 2. Penyuluhan terhadap pelajar dan pemuda 3. Penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional 4. Pemantauan dampak gejala ekonomi 5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap ormas 6. Penguatan terhadap FPK dan FKUB
		Menurunnya kualitas demokrasi	1. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat	1. Pelaksanaan pendidikan politik



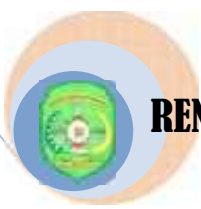
RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

		di Kabupaten Kutai Kartanegara	dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah	masyarakat dengan sasaran pelajar dan pemuda serta masyarakat luas 2. Pembinaan terhadap parpol 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu
--	--	--------------------------------	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2020 – 2024 (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum)

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2020 – 2024 adalah : ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”***

Dari visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka terdapat misi, tujuan dan sasaran yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024 tersebut sebagai berikut :



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

No.	Misi/Tujuan	Sasaran
1.	Misi : Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila Untuk Menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri	
	Tujuan : Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
		2. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
		3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

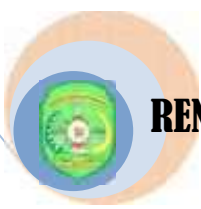
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenang an OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejala	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan



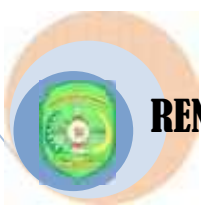
RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

					pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
	Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

					masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
	Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan sasaran pelajar dan pemuda serta masyarakat luas 2. Pembinaan terhadap parpol 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu



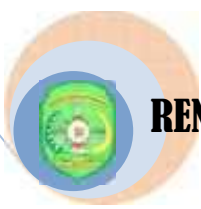
RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

3.4 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim 2019 - 2023

Visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 – 2023 telah diselaraskan dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah : **“Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”**

Dari visi tersebut, maka terdapat misi, tujuan dan sasaran yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 tersebut sebagai berikut :

No.	Misi/Tujuan	Sasaran
1.	Misi : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	
	Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
	Tujuan 2 : Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan	Sasaran 1 : Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA
	Tujuan 3 :	Sasaran 3 :



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

	Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
	Tujuan 4 : Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur	Sasaran 4 : Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur

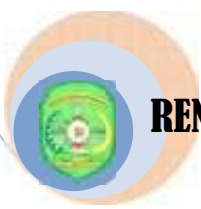
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenang an OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejala	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

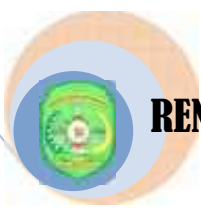
					3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
1. Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan	Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kutai	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam
2. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur					



					berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
					8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan sasaran pelajar dan pemuda serta masyarakat luas 2. Pembinaan terhadap parpol 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang ada serta ditinjau dari tugas dan fungsi yang dimiliki, gambaran pelayanan, visi dan misi program Bupati dan Wakil Bupati, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai

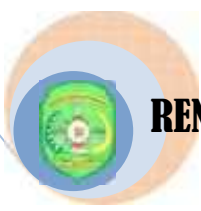


RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

Kartanegara dapat merumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui perubahan Renstra Badan Kesbangpol ini.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- C. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksese dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- D. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara.
- E. Penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara



BAB IV

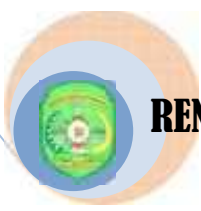
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang lebih spesifik dan terukur. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 ditetapkan tujuan sebagai berikut :

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	1. Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol

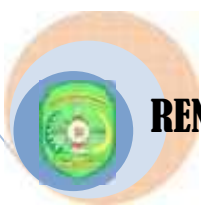


		2. Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara
--	--	---

B. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

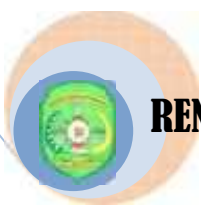
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak
	2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas
	3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol	nilai	61,75	62,00	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	64,50
		1 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	nilai	61,75	62,00	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	64,50
2	Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara		Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		1 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	kejadian	28	30	28	25	24	20	17	17
		2 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	1 Persentase aparaturn dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	persen	2,18	2,37	2,68	2,99	3,33	3,63	3,92	3,92
		3 Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	1 Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	persen	4,2	4,28	4,4	4,5	5,53	5,62	5,71	5,71

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19661226 200112 2 002



BAB V

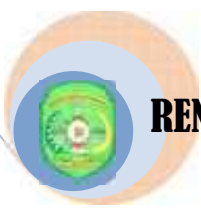
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan strategi sebagai berikut :

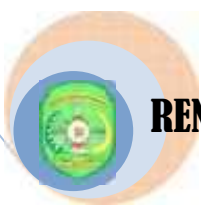
1. Melaksanakan Manajemen Berbasis Kinerja ke Seluruh ASN Badan Kesbangpol Secara Konsisten.
2. Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
3. Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri.
4. Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
5. Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas



B. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka perlu ditetapkan suatu arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum
2. Peningkatan pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD
3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur
4. Penerapan arsip baku pada Badan Kesbangpol
5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Kesbangpol
7. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat
8. Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
9. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
10. Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
11. Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
12. Penguatan kapasitas kelembagaan parpol



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

13. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
14. Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
15. Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
16. Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
17. Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba

Rumusan rangkaian pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

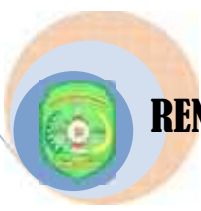
VISI (RPJMD)		“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”	
MISI (RPJMD)*		Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	
Tujuan	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Melaksanakan Manajemen Berbasis Kinerja ke Seluruh ASN Badan Kesbangpol Secara Konsisten	1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum
			2. Peningkatan pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD
			3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur
			4. Penerapan arsip baku pada Badan Kesbangpol
			5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbangpol
			6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Kesbangpol
Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat
			2. Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
			3. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	1. Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
			2. Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
			3. Penguatan kapasitas kelembagaan parpol
			4. Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu

Tujuan	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1. Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas		2. Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	3. Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			4. Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIAN TI, S.Sos., M.Si
NIP. 19831226 200112 2 002



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan Kegiatan :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

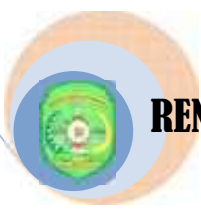
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :

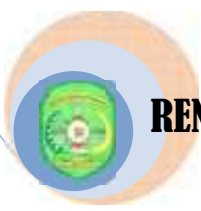
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

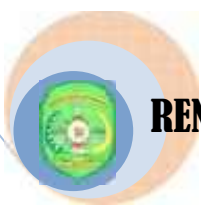
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan Sub Kegiatan :



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

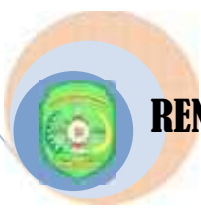
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan Kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan Kegiatan :



a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-G.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya)

Tujuan	Rencana	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Bantuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2023		2024		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai	61,75	63,25		63,50		63,75		64,00		64,50		64,50		Kepala Badan	
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol			Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai	61,75	63,25	10.059.678.285	63,50	10.059.678.285	63,75	10.308.337.692	64,00	10.170.478.285	64,50	10.210.478.285	64,50	50.808.650.832	Kepala Badan	
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,83	86	10.059.678.285	87	10.059.678.285	88	10.308.337.692	89	10.170.478.285	90	10.210.478.285	90	50.808.650.832	Sekretaris	
		8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	120.000.000	6	120.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	30	630.000.000	Kasubbag Penyusunan Program	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	40.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	230.000.000	Kasubbag Penyusunan Program	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	3	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	15	400.000.000	Kasubbag Penyusunan Program	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	20	20	8.652.912.208	20	8.652.912.208	20	8.652.912.208	20	8.652.912.208	20	8.652.912.208	100	43.264.561.040	Kasubbag Keuangan	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang/bulan	900	900	8.517.272.208,00	900	8.517.272.208,00	900	8.517.272.208,00	900	8.517.272.208,00	900	8.517.272.208,00	900	42.586.361.040	Kasubbag Keuangan	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	5	100.000.000	Kasubbag Keuangan	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	90	578.200.000	Kasubbag Keuangan	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	3	3	40.800.000	3	40.800.000	3	40.800.000	3	40.800.000	3	40.800.000	15	304.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesbangpol
		8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	3	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	15	304.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesbangpol

Tajuk	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Bentuk	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokal
							2022		2023		2024		2025		2026		Handakl Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	100.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	375	100.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan	5	6	438.753.300	6	437.753.300	6	470.243.000	6	468.393.000	6	478.383.000	30	2.293.525.600	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	3	4	3.750.000,00	4	3.750.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	20	22.500.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	29	29	27.296.000,00	29	27.296.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	145	204.592.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	19	19	13.344.000,00	19	13.344.000,00	38	25.000.000,00	38	25.000.000,00	38	25.000.000,00	152	101.688.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	cetakan	3	3	18.120.300,00	3	18.120.300,00	5	40.000.000,00	5	38.150.000,00	5	40.000.000,00	21	154.390.800	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kal	150	250	346.243.000,00	250	345.243.000,00	225	300.243.000,00	225	300.243.000,00	225	308.383.000,00	1.175	1.800.355.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	berkas	2220	2220	30.000.000,00	2220	30.000.000,00	2500	50.000.000,00	2500	50.000.000,00	2600	50.000.000,00	11.940	210.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	47.952.000	100	47.952.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	335.904.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah	unit	5	6	47.952.000,00	5	47.952.000,00	8	70.000.000	9	80.000.000,00	10	90.000.000,00	37	335.904.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	507.382.777	12	508.382.777	12	508.382.484	12	508.373.077	12	508.383.077	12	2.540.904.192	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	bulan	12	-	-	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	4.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	126.599.369,00	12	126.599.369,00	12	126.599.076,00	12	126.589.669,00	12	126.599.669,00	12	632.987.152	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	
		8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	bulan	12	12	380.783.408,00	12	380.783.408,00	12	380.783.408,00	12	380.783.408,00	12	380.783.408,00	12	1.803.917.040	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung												Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Jember	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Indikator Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	231.878.000	100	231.878.000	100	416.000.000	100	270.000.000	100	290.000.000	100	1.438.756.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol
		8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	80.000.000,00	30	70.000.000,00	30	80.000.000,00	30	330.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	40	40	108.850.000,00	40	108.850.000,00	40	206.000.000,00	40	110.000.000,00	40	110.000.000,00	40	643.700.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	43	43	23.050.000,00	43	23.050.000,00	43	50.000.000,00	43	40.000.000,00	43	50.000.000,00	43	186.100.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit gedung	2	2	49.978.000,00	2	49.978.000,00	2	80.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	279.956.000	Kasubbag Umum Kepegawaian	OPD Kesba ngpol
Terciptanya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara				Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti	Persen	0	100		100		100		100		100		100		Kepala Badan	
	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat			Penurunan Jumlah konflik dan gejala	kejadian	30	28	1.900.000.000	25	1.900.000.000	24	2.000.000.000	20	1.900.000.000	17	1.900.000.000	17	8.500.000.000	Kepala Badan	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	1.900.000.000	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	8.500.000.000	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen/bulan	12	12	1.900.000.000	12	1.800.000.000	12	2.000.000.000	12	1.900.000.000	12	1.900.000.000	80	8.500.000.000	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik	Laporan tahapan penanganan konflik	350	300	400.000.000	300	400.000.000	350	500.000.000	300	400.000.000	300	400.000.000	1.550	2.100.000.000	SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELJEN	18 Kecamatan

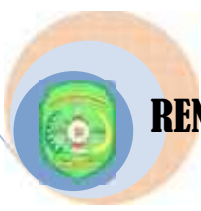
Tajuk	Isi	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Nomenklatur Pendanaan												Unit Kerja Penyelenggara Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Rendel Kinerja pada siklus periode Rencana Perangko Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopinda	laporan	22	50	1.500.000.000	50	1.400.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	250	7.400.000.000	SUB BIDANG PENANGKATAN KONFLIK	4 Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah			Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Persen	4,28	4,40	1.903.694.600	4,50	2.003.694.600	5,53	3.626.894.600	5,62	1.802.894.600	5,71	1.802.894.600	5,71	11.140.073.000	Kepala Badan	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	Persen	11,04	11,36	1.903.694.600	11,62	2.003.694.600	14,27	3.626.894.600	14,51	1.802.894.600	14,75	1.802.894.600	14,75	11.140.073.000	Kabid Poldagri	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	dokumen/bulan	12	12	1.903.694.600	12	2.003.694.600	12	3.626.894.600	12	1.802.894.600	12	1.802.894.600	60	11.140.073.000	Kabid Poldagri	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	orang	20.866	600	400.800.000	500	400.800.000	5.000	1.724.000.000	480	250.000.000,00	480	280.000.000,00	7.020	3.026.600.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI	7 kecamatan
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi,penyaluran dan movev bankeu parpol	parpol	16	16	1.402.894.600	16	1.402.894.600	16	1.402.894.600	16	1.402.894.600	16	1.402.894.600	16	7.014.473.000	SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	16 kecamatan
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah	Laporan	24	24	100.000.000	46	200.000.000	150	500.000.000	24	150.000.000	24	150.000.000	270	1.100.000.000	SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	16 kecamatan

Tahun	Sasaran	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (instrumen), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Bentuk	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan												Unit Kerja Pemangket Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2023		2023		2024		2025		2025		2026				Indikator Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Pemangket Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas			Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persen	2,37	2,68	1.530.000.000	2,99	1.530.000.000	3,33	1.760.000.000	3,63	1.520.000.000	3,92	1.480.000.000	3,92	7.820.000.000	Kepala Badan			
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	1,41	1,59	700.000.000	1,78	700.000.000	1,99	900.000.000	2,17	700.000.000	2,34	650.000.000	2,34	3.650.000.000	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAA N DAN KARAKTER BANGSA			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokume n/bulan	12	12	700.000.000	12	700.000.000	12	900.000.000	12	700.000.000	12	650.000.000	60	3.650.000.000	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAA N DAN KARAKTER BANGSA			
		8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binela Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	orang	5.657	500	400.000.000	500	400.000.000	580	500.000.000	500	400.000.000	600	400.000.000	2.550	2.100.000.000	SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAA N	9 kecamatan		
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binela Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	orang	1.215	400	300.000.000	400	300.000.000	600	400.000.000	400	300.000.000	300	250.000.000	2.000	1.550.000.000	SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	10 kecamatan		
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	Persen	0,96	1,09	730.000.000	1,21	730.000.000	1,33	810.000.000	1,45	620.000.000	1,58	630.000.000	1,58	3.320.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI,SO SIAL,BUDAYA ,AGAMA DAN ORMAS			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	dokume n/triwula n	6	6	730.000.000	6	730.000.000	6	810.000.000	5	620.000.000	5	630.000.000	28	3.320.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI,SO SIAL,BUDAYA ,AGAMA DAN ORMAS			
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	orang	4.713	600	505.000.000	600	505.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	3.000	2.510.000.000	SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	2 Kecamatan		
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud	laporan	18	22	225.000.000	22	225.000.000	18	110.000.000	18	120.000.000,00	18	130.000.000,00	98	810.000.000	SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	2 Kecamatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Penanggung Jawab	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	Persen	7,9	8,9	100.000.000	9,9	100.000.000	11,4	250.000.000	12,9	200.000.000	14,4	200.000.000	14,4	850.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SO SIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	dokumen	30	20	100.000.000	20	100.000.000	30	250.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	130	850.000.000	BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SO SIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS	
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi	ormas	158	30	100.000.000	25	100.000.000	30	250.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	145	850.000.000	SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8 kecamatan
			TOTAL					15.393.372.885		15.393.372.885		17.695.232.292		15.393.372.885		15.393.372.885		15.393.372.885		



Kepala Badan Rehabpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,
BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RINDA DESANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 196912262005122002

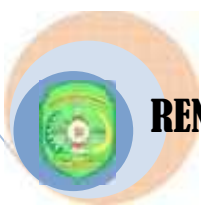


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	1. Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	Kesbangpol dan Kepolisian
3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Kesbangpol dan KPU

Penetapan Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Kesbangpol	61,75	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	64,50
2	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):							
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	61,75	63,25	63,50	63,75	64,00	64,50	64,50
2	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	30	28	25	24	20	17	17
3	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	2,37	2,68	2,99	3,33	3,63	3,92	3,92
4	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	4,28	4,4	4,5	5,53	5,62	5,71	5,71
II	INDIKATOR PROGRAM:							
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,83	86	87	88	89	90	90
2	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,04	11,36	11,62	14,27	14,51	14,75	14,75
4	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,37	2,68	2,99	3,33	3,63	3,92	3,92
5	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	0,96	1,09	1,21	1,33	1,45	1,58	1,58

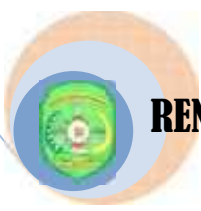
No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RP.JMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RP.JMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase ormas yang tertib administrasi	7,9	8,9	9,9	11,4	12,9	14,4	14,4
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12	12	12	12	12	12	60
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12	12	12	12	12	12	60
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12	12	12	12	12	12	60
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5	5	5	5	5	5	25
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	20	20	30	30	30	130



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

NIP. 19691226 200112 2 002



BAB VIII

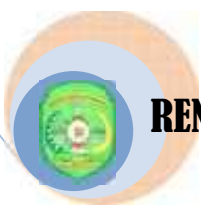
PENUTUP

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renstra bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Renstra adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renstra Badan Kesbangpol 2021 – 2026 meliputi : 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, 2) Merumuskan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

Renstra Badan Kesbangpol ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam peningkatan di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode lima tahun, pada tahun 2021 – 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.



RENSTRA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021-2026

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI.

Badan Kesbangpol terutama berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Tenggarong, September 2021

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

NIP. 19691226 200112 2 002